

**TESIS**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DIRI SESEORANG YANG  
DIPOTRET TANPA IZIN UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIAL  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014  
TENTANG HAK CIPTA**

**(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 262 K/ Pdt. Sus-HKI/2016)**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memenuhi Gelar Magister Ilmu  
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Andalas**



**OLEH :**  
**MELI RAHMAYANTI**  
**NIM: 2120113020**

**DOSEN PEMBIMBING :**

- 1. Prof. Dr. Busyra Azheri, S.H., M.Hum**
- 2. Dr. Yussy Adelina Mannas, S.H., M.H**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
TAHUN 2024**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DIRI SESEORANG YANG  
DIPOTRET TANPA IZIN UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIAL  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG  
HAK CIPTA**

**(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 262 K/ Pdt. Sus-HKI/2016)**

**(Meli Rahmayanti, 2120113020, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas  
Hukum, Universitas Andalas, 140 Halaman, 2024)**

**ABSTRAK**

Potret adalah karya fotografi dengan objek manusia. Pasal 1 angka 10 UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Potret banyak digunakan dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari. Masuknya potret sebagai objek yang mendapat perlindungan hukum disebabkan potret selain sebagai hasil karya fotografi, juga memiliki aspek ekonomi dan memiliki perlindungan hak privasi bagi pencipta maupun pemegang hak cipta. Permasalahan muncul manakala seseorang mengambil potret seseorang yang digunakan untuk tujuan komersial dan subjek dalam potret tersebut tidak mengetahui bahwa potret dirinya digunakan untuk kepentingan komersial, hal ini menarik untuk dikaji salah satunya mengenai penggunaan potret seseorang. Meskipun sudah ada perlindungan hak cipta terkait karya potret, tetapi masih kerap muncul permasalahan seseorang yang menggunakan karya orang lain. Adapun Rumusan Masalah (1) Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak ekonomi yang dimiliki oleh seseorang yang dijadikan objek dalam potret yang diambil tanpa izin dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 262 K/ Pdt. Sus-HKI/2016?, (2) Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 262 K/ Pdt. Sus-HKI/2016?. dan (3) Bagaimana tanggung jawab hukum atas pelanggaran hak cipta potret tanpa izin yang digunakan untuk kepentingan komersial berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Kesimpulan hasil penelitian ini adalah : (1) Perlindungan hak cipta terhadap orang yang dipotret tanpa izin dapat berupa perlindungan hukum secara preventif dan represif. Penggunaan potret seseorang yang digunakan untuk kepentingan komersial diharuskan dibuatkan perjanjian tertulis agar dapat diketahui oleh para pihak bahwa pihak yang menjadi objek potret bersedia bahwa potret dirinya akan digunakan untuk komersial. (2) Mahkamah Agung berpendapat dalam pertimbangannya bahwa alasan-alasan Pemohon Kasasi/Tergugat tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak salah menerapkan hukum, namun demikian majelis hakim memandang perlu untuk melakukan perbaikan sepanjang amar putusan ke-4 mengenai *dwangsom*. dan (3) Tanggung jawab hukum merupakan tanggung jawab yang dibebankan kepada subjek hukum atau pelaku yang telah melakukan perbuatan melawan hukum. Tanggung jawab dalam hak cipta merupakan tanggung jawab *liability*. *Liability* mengartikan bahwa pertanggungjawaban hukum sebagai tanggung gugat yang diakibatkan oleh kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum.

**Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Potret, Tanpa Izin, Komersial.**

**LEGAL PROTECTION OF A PERSON WHO IS PICTURED WITHOUT  
PERMISSION FOR COMMERCIAL INTERESTS BASED ON LAW NUMBER  
28 OF 2014 CONCERNING COPYRIGHT**  
**(Study of Supreme Court Decision Number 262 K/ Rev. Sus-HKI/2016)**

**(Meli Rahmayanti, 2120113020, Master of Law Study Program, Faculty of Law,  
Andalas University, 140 Pages, 2024)**

**ABSTRACT**

*Portraits are photographic works with human objects, Article 1 number 10 of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. Portraits are widely used in everyday social life. The inclusion of portraits as objects that receive legal protection is because portraits, apart from being photographic works, also have economic aspects and protect the privacy rights of creators and copyright holders. Problems arise when someone takes a portrait of someone who is used for commercial purposes and the subject in the portrait does not know that his or her portrait is being used for commercial purposes. This is an interesting thing to study, one of which is regarding the use of someone's portrait. Even though there is copyright protection regarding portrait works, problems still often arise when someone uses someone else's work.. The Formulation of the Problem (1) How is the legal protection of the economic rights owned by someone who is used as an object in a portrait taken without permission in the Supreme Court Decision Number 262 K/ Pdt. Sus-HKI/2016?, (2) What are the legal considerations of the judge in the Supreme Court Decision Number 262 K/ Pdt. Sus-HKI/2016?. and (3) What is the legal responsibility for copyright infringement of unauthorized portraits used for commercial purposes based on Law Number 28 of 2014 concerning Copyright?. The research method used is the normative legal research method. The conclusions of this research are: (1) Copyright protection for people photographed without permission can take the form of preventive and repressive legal protection. The use of a person's portrait for commercial purposes requires a written agreement to be made so that the parties know that the party who is the object of the portrait is willing that their portrait will be used for commercial purposes.. (2) The Supreme Court is of the opinion that the reasons of the Cassation Petitioner/Defendant cannot be justified, because the Commercial Court at the Surabaya District Court did not apply the law incorrectly, however, the panel of judges deemed it necessary to make improvements along the lines of the 4th decision regarding dwangsom. and (3) Legal responsibility is the responsibility imposed on legal subjects or perpetrators who have committed unlawful acts. Responsibility in copyright is a liability responsibility. Liability means that legal responsibility is a responsibility resulting from an error committed by a legal subject.*

**Keywords:** Legal Protection, Portrait, Without Permit, Commercial.